

ABSTRAK

Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dalam Hal Terjadinya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Ganda Pada Satu Lokasi Yang Sama

Elthon Brameista Gunawan

1487057

Izin Usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian di daerah dalam usaha pertambangan didapati berbagai persoalan hukum yang terjadi, salah satunya ialah timbul Izin Usaha Pertambangan ganda pada lokasi yang sama.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi literature, menggunakan konsep pendekatan penelitian konseptual dan undang-undang dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari identifikasi masalah menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.

Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam Izin Usaha Pertambangan ganda dalam hal ini kepala daerah selaku yang menerbitkan izin tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. Perlindungan hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ganda tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang akan tetapi menurut pengamatan penulis perlindungan hukum diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ganda yaitu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu

Kata Kunci: Perizinan, Usaha Pertambangan, Pertambangan.

ABSTRACT

Government Responsibility and Legal Protection For The Holders of Mining Business Licenses (IUP) Exploration In The occurrence of Issuance of Mining Business License (IUP) Dual Exploration At The Same Location

Elthon Brameista Gunawan
1487057

Mining Business License means the granting of a license to conduct a mining business to an individual or entity granted by the Regional Government. Mining Business License shall be granted in the form of Mining Permit. The Mining Business License consists of two stages: Exploration Mining Business License covering general investigation, exploration and feasibility study and Mining Operation License of Production Operation covering construction, mining, processing and refining activities, as well as transportation and sales activities. Along with the growth and development of the region's economy in the mining business, various legal problems are encountered, one of which is the emergence of a double mining business license at the same location.

This research method uses normative juridical research method is analytical descriptive based from the merging of primary, secondary and tertiary data collected based on literature study, using conceptual conceptual approach and law in doing research on this thesis and drawing a conclusion as the answer of identification problem using Law Number 4 Year 2009 About Mineral and Coal.

The result of this research is found that the government's responsibility in Mining License in this case the head of region as the issuer of the license may be subject to criminal sanction as regulated in Article 165 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Legal protection for multiple Mining License (IUP) holders is not clearly regulated in the Law but according to the observation of the author of legal protection is given to the pementor of Mining Business License (IUP) double that is Article 162 of Law Number 4 Year 2009 About Mineral and Stone.

Keywords: Licensing, Mining Business, Mining.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iv
Lembar Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9

	1. Kerangka Teori.....	9
	2. Kerangka Konseptual.....	13
	F. Metode Penelitian.....	17
	1. Jenis Penelitian.....	17
	2. Jenis dan Sumber Data.....	17
	3. Pendekatan Penelitian.....	18
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
	5. Teknik Analisis Data.....	20
	G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DI	
	INDONESIA	23
	A. Perlindungan Hukum	23
	B. Penegakan Hukum	28
	C. Subjek Hukum.....	31
	D. Hubungan Hukum.....	36
	E. Asas Hukum.....	37
BAB III	PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
	EKSPLORASI DALAM PERTAMBANGAN	
	MINERAL DAN BATU BARA	42
	A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	42

1. Pengertian Pertambangan	42
2. Penggolongan Bahan Tambang	47
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan	51
4. Jenis Perizinan Pertambangan	53
5. Prinsip Pemberian Izin Usaha Pertambangan	54
6. Tahap Memperoleh Izin Usaha Pertambangan	55
7. Asas-asas Hukum Pertambangan	66
 BAB IV ANALISI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) GANDA DALAM LOKASI YANG SAMA	 69
A. Pertanggungjawaban pemerintah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada lebih dari satu subjek hukum atau lebih yang berbeda didalam lokasi yang sama.....	69
B. Perlindungan hukum bagi para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ekplorasi akibat penerbitan izin ganda didalam lokasi yang sama	77
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 85
 Daftar Pustaka.....	 88